

Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2022

Diana Wijayanti*, Ismayana Dwi Nanda Putri

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: diana.wijayanti@uui.ac.id

JEL Classification Code:

I24, D8, E2

Kata kunci:

Ketimpangan, Indeks TIK, Upah Minimum Regional

Email penulis:

20313086@students.uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol2.iss2.art2

Abstract

Purpose – This research aims to analyze the determination of income inequality on the island of Java in 2017-2022, by analyzing the relationship between the variables GRDP, HDI, UMR and ICT Index on income inequality.

Methods – This research uses panel data regression analysis which shows that Fixed Effect is the most appropriate model. This research uses four independent variables, namely GRDP, Human Development Index (HDI), Regional Minimum Wage (UMR) and Technology and Communication Development Index (ICT), while the dependent variable is income inequality which is measured using the Gini Index (Gini Ratio).

Findings – The results of this study show that the UMR has a negative effect on income inequality, while the ICT Index has a positive effect on income inequality on the island of Java. Meanwhile, GRDP and HDI have no effect on income inequality on the island of Java.

Implication – The implications of the results of this research are related to government policy in overcoming the problem of income inequality, especially on the island of Java.

Originality – This research contributes to improving Indonesia's economic conditions, especially regarding the role of information technology in overcoming the problem of income inequality.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022, dengan menganalisis hubungan antara variabel PDRB, IPM, UMR dan Indeks TIK terhadap ketimpangan Pendapatan.

Metode – Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diperoleh hasil bahwa Fixed Effect merupakan model yang paling tepat. Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR) serta Indeks Pembangunan Tehnologi dan Komunikasi (TIK), sedangkan variabel terikatnya adalah ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini (*Gini Ratio*).

Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMR berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Indeks TIK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sementara itu, PDRB dan IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Implikasi – Implikasi dari hasil penelitian ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan, khususnya yang ada di Pulau Jawa.

Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia terutama yang terkait peranan teknologi Informasi dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan perekonomian dalam rangka menaikkan taraf hidup Masyarakat (Arsyad, 2015). Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional yang saling berkaitan yang mencakup seluruh sistem sosial, baik secara politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan IPTEK, kelembagaan hingga kebudayaan di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2004). Dengan demikian pembangunan ekonomi harus mencakup proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan ekonomi akan memperlebar ketimpangan antar kelompok. Tingginya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan permasalahan besar yang terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Tambunan, 2011).

Pembangunan ekonomi dilakukan untuk mendukung dan menjadi perangsang berkembangnya pembangunan pada setiap daerah. Proses pembangunan daerah ini selanjutnya akan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan yang optimal (Nursahid & Mintarti, 2021). Percepatan pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menggunakan beberapa instrument kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, namun seringkali menimbulkan permasalahan baru, karena negara Indonesia terdiri dari banyak wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik yang berbeda antar wilayah. Wilayah dengan karakteristik kepulauan ini memungkinkan untuk terjadinya perbedaan geografis yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman kondisi pada setiap wilayah di Indonesia. Ketidakseragaman ini akan menimbulkan efek pada tingkat kemampuan setiap wilayahnya untuk tumbuh secara bersamaan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan (Farhan & Sugianto, 2022).

Strategi Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun demikian juga dengan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan baik dalam jumlah orang miskin, maupun tingkat kemiskinannya. Namun ditengah suksesnya kinerja pemerintah dalam menjalankan strategi pembangunan tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat secara merata. Ketimpangan dari tahun ke tahun semakin melebar. Golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam “menikmati kue” suksesnya pertumbuhan ekonomi Indonesia (Wibowo.T, 2016).

Secara spesifik Kuznet (1955), menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pola ketimpangan pendapatan menurut Kuznet berbentuk U terbalik dimana ketimpangan mula-mula meningkat dan kemudian menurun selama proses pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, ketimpangan pendapatan akan meningkat dan mencapai puncaknya dan turun setelah tahap perkembangan ambang batas kritis pada tingkat pendapatan tertentu. Kuznet mendokumentasikan argumen ini menggunakan data lintas negara dan data deret waktu. (Lee, Kim, & Cin, 2013).

Hal ini menjadikan kajian tentang masalah ketimpangan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena tingginya ketimpangan pendapatan akan mengurangi efektifitas kebijakan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan (Kaulihowa & Adjasi, 2018). Selain itu, tingginya ketimpangan pendapatan akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sosial politik yang pada akhirnya akan menurunkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan menghambat proses pembangunan berkelanjutan (Ravinthirakumaran, & Ravinthirakumaran, 2018).

Ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan melalui perhitungan Indeks Rasio Gini (*Gini ratio*). Indeks ini menjelaskan tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah. Indeks Gini akan memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan yang dilihat dari tinggi atau rendahnya nilai koefisien gini (Febriyani & Anis, 2022). Tercatat tingkat ketimpangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan berada pada kisaran nilai Indeks Gini sebesar 0,38 bahkan pada tahun 2015, Indonesia menyentuh nilai 0,42 angka ini merupakan angka yang cukup tinggi dalam ketimpangan (World Bank, 2015). Fluktuasi nilai Indeks Gini ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

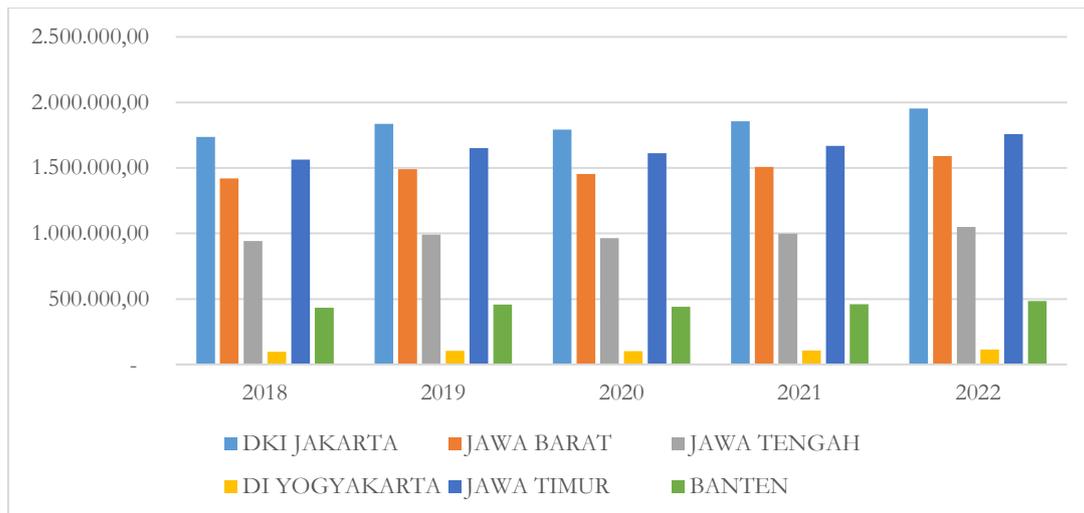
Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu daerah, salah satunya terjadi karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi (Riyanti & Karimi, (2022). Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan salah satu indikator dari makro ekonomi yang biasanya digunakan untuk mengukur suatu kinerja ekonomi di suatu negara. PDB atau pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam setiap wilayah. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi inilah yang dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang tentunya harus dilaksanakan secara merata dan optimal. Indikasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengartikan semakin baik pula kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah, hal ini membuat asumsi bahwa ketimpangan pendapatan akan semakin rendah nilainya. Karena itulah kegiatan pembangunan juga harus berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi demi menekan ketimpangan pendapatan. (Febriyani & Anis, 2022). Selain pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi, intervensi publik, dan pendidikan, juga disebutkan sebagai faktor yang berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan (Suárez-Arbesú, Apergis, & Delgado, 2023).

Upah Minimum Regional menjadi salah satu variabel yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan (Amali, 2023),(Caesarisma, .2023). Upah minimum merupakan alat yang efektif untuk menekan ketimpangan pendapatan. Sebagai sebuah kebijakan upah minimum dapat mempengaruhi kenaikan pendapatan dan mempunyai dampak penting bagi pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Sungkar & Nazamuddin, 2015). Perbedaan kemampuan masyarakat juga akan menyebabkan adanya perbedaan jumlah upah dan perbedaan pemenuhan modal. Hal ini akan semakin memperbesar gap pendapatan masyarakat.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meningkatkan pembangunan manusia akan berakibat berkurangnya kemiskinan. Ketika pertumbuhan belanja modal pemerintah meningkat, pengangguran menurun maka indeks pembangunan manusia akan membaik. Oleh karena itu, kebijakan berbasis infrastruktur, yang pada awalnya mengurangi pengangguran, pada akhirnya juga akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat (Akinbobola & Saibu, 2004). Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia berdampak terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik diharapkan dapat mengurangi angka ketimpangan pendapatan yang ada (Lala, Naukoko & Siwu, 2023), (Walujadi & Endri, 2022).

Beberapa kajian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa teknologi informasi juga berperan penting di dalam terjadinya ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, tetapi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Perkembangan teknologi berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, penggantian posisi pekerjaan mesin otomatis, dapat memperburuk ketimpangan. Hasil penelitian di negara-negara Eropa Tengah dan Inggris menjelaskan bahwa semakin maju perekonomian suatu negara, semakin kecil dampak perubahan teknologi terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin dalam ketimpangan pendapatan di suatu negara, semakin besar respons negara tersebut terhadap perubahan teknologi, namun dampak terhadap ketimpangan dapat bersifat positif dan negatif (Kharlamova, Stavytskyy, & Zarotiadis, 2018).

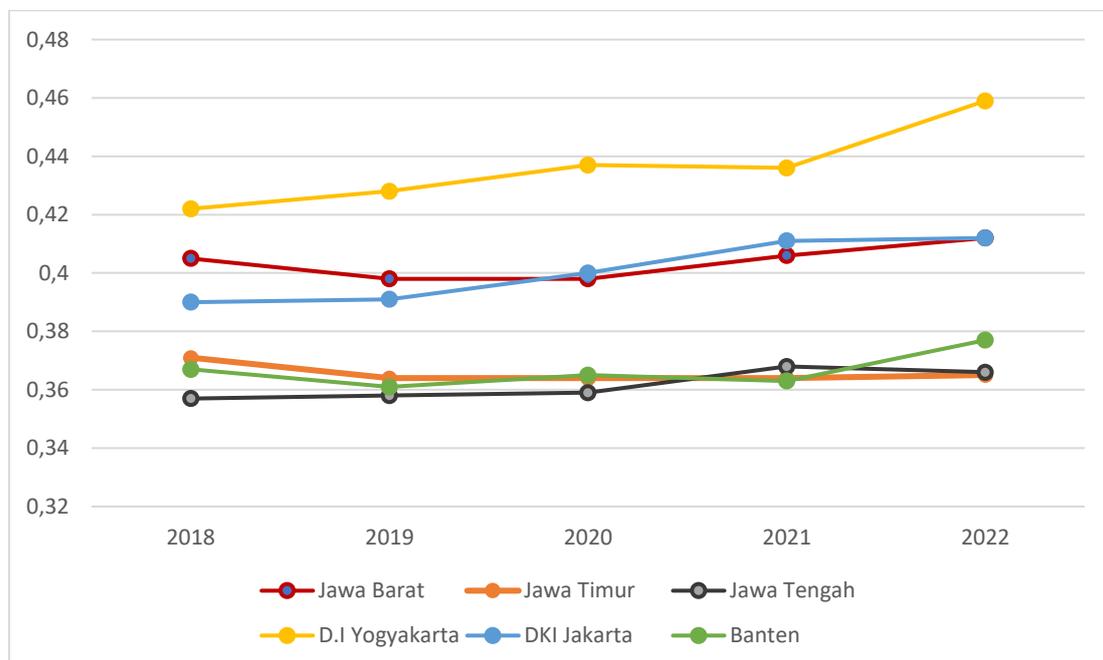
Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia, juga tidak terlepas dari karakteristik wilayah yang terdiri dari ribuan pulau (Farhan & Sugianto, 2022). Secara proyeksi spasial, wilayah di Indonesia memang mengalami penguatan, namun yang menarik adalah Pulau Jawa mampu menyumbang kontribusi tinggi dalam perekonomian nasional dengan 56,58% pada tahun 2022 (Moegiarso, 2023). Bahkan sampai dengan kuartal 1 tahun 2023 Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi terhadap PDB Indonesia. Hal ini karena dari sisi sumberdaya manusia, infrastruktur dan sumberdaya alam Pulau Jawa lebih siap menjadi lokasi pengembangan industri yang dalam hal ini merupakan sektor berkontribusi besar terhadap nilai PDRB dibandingkan pulau lain.



Sumber : BPS berbagai tahun, diolah

Gambar 1. PDRB Menurut Harga Konstan di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (dalam milyar Rp)

Jika dilihat nilai PDRB di 6 provinsi yang ada di pulau jawa cukup bervariasi. Terdapat perbedaan yang sangat besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di propinsi yang ada di Pulau Jawa. PDRB Provinsi tertinggi di Pulau Jawa dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 1.953.455,85 milyar pada tahun 2022, di ikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai PDRB sebesar Rp 1.757.821,43 milyar , serta Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp 1.589.984,93 milyar, Propinsi Jawa Tengah sebesar 1.050.322,13milyar dan Propinsi Banten sebesar 484.141,83 milyar. Sedangkan nilai PDRB Propinsi terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai PDRB sebesar 112.898,32milyar atau sebesar kurang dari 6 persen dari PDRB DKI Jakarta.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2. Nilai Indeks Gini di Pulau Jawa Tahun 2018-2022

Seiring dengan besarnya PDRB propinsi di Pulau Jawa, ketimpangan pendapatan dari semua provinsi di Pulau Jawa, mempunyai nilai indeks gini yang cukup beragam. Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa nilai indeks gini cukup berfluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan ketimpangan yang cukup rendah dari 0.390 persen tahun 2018 menjadi 0.412 persen tahun. Hal ini bisa dikarenakan pertumbuhan

ekonomi di Provinsi DKI Jakarta yang masih berkontribusi besar diatas perekonomian nasional yang tercatat pada kisaran 3-4 persen diatas pertumbuhan rata-rata nasional. Kenaikan ketimpangan terjadi pada tahun 2022 sebesar 0.011 persen, hal ini dikarenakan mulai pulihnya pendapatan kalangan atas sedangkan kalangan bawah harus dihadapkan pada harga bahan pokok yang tinggi dan pemutusan kontrak akibat pandemi. Secara keseluruhan pada Pulau Jawa, tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi ada di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 0.459 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Timur berada diposisi terakhir dengan nilai koefisien gini sebesar 0.365.

Berbagai kondisi tersebut diatas menjadikan penting untuk dilakukan kajian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan mengingat persoalan ketimpangan pendapatan sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum bisa di atasi secara tuntas.

Metode Penelitian

Penelitian ini mencakup enam Propinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY tahun 2017- 2022. Dengan menggunakan data sekunder terdiri dari variable bebas/independen yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP/UMR) dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sedangkan, variable terikat/dependen adalah ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Indeks Rasio Gini (*Gini Ratio*).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi
Ketimpangan Pendapatan	Gini	Indeks	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Interpretasinya nilai gini rasio berkisar antara 0 sampai 1.
Log Produk Domestik Bruto	PDRB	Persen	Jumlah nilai tambah bruto (<i>gross value added</i>) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Indeks	Mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Log Upah Minimum Kab/Kota.	UMK	Persen	Upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	TIK	Indeks	Mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dimana metode regresi data panel pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya: Pemilihan model estimasi, Penentuan metode estimasi dan Interpretasi hasil. Metode regresi data panel terdapat tiga pendekatan model yaitu model *Common Effect* (CEM), model *Fixed Effect* (FEM), dan model *Random Effect* (REM). Model penelitian untuk penelitian ini adalah:

$$Gini_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \beta_3 \text{LogUMK}_{it} + \beta_4 \text{TIK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$Gini_{it}$ = Ketimpangan Pendapatan

LogPDRB_{it} = Log Produk Domestik Regional Bruto

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia

LogUMK_{it} = Log Upah Minimum Kab/Kota.

TIK_{it} = Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

i = Banyaknya observasi (6 Provinsi di Pulau Jawa)

t = Banyaknya waktu (Periode 2017-2022)

ε = *Error term*

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2017 hingga 2022 meliputi enam propinsi di Pulau Jawa, dengan jumlah observasi sebanyak 30. Langkah analisis data dilakukan melalui pengujian pemilihan model yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Uji Chow			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.684298	(5,26)	0.0011
Cross-section Chi-square	26.591853	5	0.0001
Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.691010	4	0.0006

Jika nilai Prob. *Cross-section* Chi-square $< 0,05$ maka kita akan memilih *fixed effect* dari pada *common effect*. Dan sebaliknya jika nilainya $> 0,05$ maka kita akan memilih *common effect* daripada *fixed effect*. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai prob sebesar $0,000 < 0,05$ maka chow test memilih *fixed effect*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji hausman dilihat dari nilai *probability cross-section random* (Widarjono, 2009), jika nilai *probability cross-section random* $< 0,05$, maka model yang dipilih adalah pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan jika nilai *probability cross-section random* $> 0,05$, maka model yang dipilih adalah pendekatan efek acak (*random effect*). Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai prob sebesar $0,04431 < 0,05$ menunjukkan bahwa berdasarkan hausman test memilih *fixed effect* sebagai model terbaik.

Tabel 3. Hasil Estimasi Metode Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.572293	-1.322910	1.944420	0.0627
<i>LogPDRB</i>	0.002793	0.084977	-0.032873	0.9740
<i>IPM_{it}</i>	0.000993	0.001426	0.696445	0.4923
<i>LogUMK_{it}</i>	0.176720	-0.082273	-2.147971	0.0412
<i>TIK_{it}</i>	0.056406	0.029206	1.931314	0.0644
F-Stat	23.02032		R-Squared	0.849903
Prob. F	0,000			

Berdasarkan hasil olah data menggunakan E-views dalam penelitian ini, diperoleh nilai F-statistik sebesar 23.02032 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari alpha 10 persen, sehingga variabel independen yang terdiri dari PDRB, IPM, UMR dan Indeks Pembangunan TIK secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan wilayah. Berdasarkan hasil olah data, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.849903 atau 84,9persen artinya variabel ketimpangan dapat dijelaskan dalam variabel independen yaitu dari PDRB, IPM, UMR dan Indeks Pembangunan TIK. Sedangkan sisanya sebesar 15,1persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Dengan menggunakan fixed effect model diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sekalipun PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, namun tidak secara langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan, karena nilai PDRB hanya mencerminkan total nilai produksi. Nilai PDRB tidak menjelaskan bagaimana distribusi pendapatan antar masyarakat. Kenaikan PDRB hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat yang berpendapatan tinggi, sementara masyarakat yang berpendapatan rendah hanya menikmati bagian kecil dari kenaikan PDRB (Puspita 2019). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Annisa & Ali, 2022) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Di Pulau Jawa sektor industri memiliki peran besar dalam PDRB. Meskipun kontribusi sangat besar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, namun tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena sektor ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, sehingga

perbaikan pendapatan hanya terkonsentrasi pada kalangan elit, sehingga golongan bawah tidak merasakan dampak dari aktifitas sektor ini secara nyata (Nadya & Syafri, 2019).

IPM menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia. Pada hakikatnya IPM mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Peran Pendidikan formal dan kualitas kesehatan yang baik akan menaikkan produktifitas tenaga kerja, sehingga pendapatan akan naik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rinjani, 2018). yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. IPM yang tidak merata di berbagai daerah di Pulau Jawa menjadikan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Pulau Jawa juga tidak merata. Hal ini menyebabkan kesempatan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi akan semakin kecil, karena semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat, maka akan menyebabkan ketimpangan pendapatan menurun. Hal ini yang menyebabkan IPM di Pulau Jawa tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti kenaikan UMR akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ulandri dan Qarina, 2021) upah yang cenderung rendah akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, karena realitasnya upah yang tinggi akan mendorong produktivitas yang lebih besar. Perbedaan tingkat upah akan cenderung berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Disisi lain upah yang tinggi akan menaikkan daya konsumsi masyarakat dan sisi demand barang maupun jasa. Ketika tingkat upah bisa memenuhi kebutuhan hidup tiap individu, maka ketimpangan pendapatan akan semakin menurun (Rahman & Putri 2021).

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication of Teknologi* (ICT) merupakan ukuran yang mencerminkan kemampuan digital regional. Dalam penelitian ini, TIK ini memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Perkembangan teknologi yang tidak merata di berbagai daerah berpotensi munculnya ketimpangan akibat perbedaan sarana, prasarana maupun akses terhadap sumber informasi dan teknologi. Walaupun Pulau Jawa merupakan daerah dengan perkembangan TIK tercepat dan akses yang mudah dijangkau, namun pada kenyataannya, perkembangan akan TIK hanya dirasakan oleh hampir 80% masyarakat perkotaan. Ketimpangan yang terjadi pada akses layanan maupun keterbelakangan teknologi dan informasi ini dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan sosial maupun ekonomi di suatu wilayah dikarenakan ini akan menjadi akar permasalahan dalam pengembangan sumber daya manusia yang termasuk didalamnya menyangkut akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun skill (Riyadi & Larasaty, 2019). Hal ini akan menyebabkan tingkat upah para pekerja yang berbeda, pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat juga meningkatkan partisipasi teknologi yang akan menggantikan modal dan keterampilan dari manusia yang berujung pada pengurangan permintaan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan temuan (Wahyuningrum & Aisyah, 2023) bahwa TIK dan upah pekerja yang memiliki keterampilan lebih tinggi akan memiliki pengaruh positif yang kuat, sementara upah pekerja dengan keterampilan rendah tidak memiliki hal tersebut. Studi lain menjelaskan bahwa perluasan akses internet di Indonesia tidak sejalan dengan kompetensi digital masyarakatnya. Di dalamnya terdapat motivasi untuk lebih produktif menggunakan internet, mendapatkan informasi yang bermanfaat dan memanfaatkannya untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan perekonomian (Jayanthi, R., & Dinaseviani, A., 2022).

Kesimpulan dan Implikasi

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Pulau Jawa pada tahun 2017-2022. Keberhasilan pembangunan di Pulau Jawa pada kenyataannya tidak dinikmati oleh masyarakat secara merata, sehingga pesatnya pembangunan di Pulau Jawa, tidak berdampak terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. IPM yang tidak merata di berbagai daerah di Pulau Jawa menjadikan

kualitas sumberdaya manusia yang ada di Pulau Jawa juga tidak merata. Hal ini menyebabkan kesempatan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi akan semakin kecil, sehingga peningkatan IPM tidak berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan. Adapun UMR berpengaruh berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti kenaikan UMR akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sedangkan Indeks Pembangunan TIK pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat yang menguasai teknologi ada di wilayah perkotaan. Kemampuan teknologi ini membuat sebagian masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sehingga hal ini akan mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan. Dari hasil temuan tersebut maka penting bagi pemerintah untuk mempertimbangan berbagai faktor terutama yang berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemerataan akses terhadap teknologi informasi menjadi perhatian utama pemerintah sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Daftar Pustaka

- Akinbobola, T. O., & Saibu, M. O. O. (2004). Income inequality, unemployment, and poverty in Nigeria: a vector autoregressive approach. *The Journal of Policy Reform*, 7(3), 175-183.
- Amali, F. N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 815-820.
- Arsyad, Lincolin. (2015). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Caesarisma, E. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243-258.
- Febriyani, A., & Anis, Ali. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 3 (4), 9 – 16.
- Jayanthi, R. & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi COVID-19. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)* Vol. 24 No. 2.
- Kaulihowa, T., & Adjasi, C. (2018). FDI and income inequality in Africa. *Oxford Development Studies*, 46(2), 250-265.
- Kharlamova, G., Stavtysky, A., & Zarotiadis, G. (2018). The impact of technological changes on income inequality: the EU states case study. *Journal of International Studies* (2071-8330), 11(2).
- Kuznets, Simon. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*. Volume XLV.
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61-72.
- Lee, H. Y., Kim, J., & Cin, B. C. (2013). Empirical analysis on the determinants of income inequality in Korea. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 53(1), 95-109.
- Moegiarso, S. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5, 31%, Tertinggi Sejak 2014. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37-52.
- Nursahid, E., Priyagus, P., & Mintarti, S. (2021). Analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*.
- Puspita, Cahyani, N. M. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rahman, R. & Putri, D. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. . *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 3 (3), 37 – 48.
- Ravinthirakumaran, K., & Ravinthirakumaran, N. (2018). The impact of foreign direct investment on income inequality: a panel Autogressive Distributed Lag approach for the Asia-Pacific Economic Cooperation developing economies. *Asia-Pacific Sustainable Development*, 57.
- Rinjani, M. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2016. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riyadi, R., & Larasaty, P. (2020). Ketimpangan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dengan Pendekatan Human Opportunity Index (HOI). In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2020, No. 1, pp. 560-570).
- Riyanti, A., & Karimi, K. (2022). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Barat. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 21(3).
- Suárez-Arbesú, C., Apergis, N., & Delgado, F. J. (2023). Club convergence and factors of income inequality in the European Union. *International Journal of Finance & Economics*, 28(4), 3654-3666.
- Sungkar, S. N., & Nazamuddin, M. N. (2015). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2).
- Tambunan, Tulus T.H., (2011). *Perekonomian Indonesia: Kaian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Ulandri, S., F. & Qarina. (2021). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017. *ICOR: Journal of Regional Economics*, Vol. 02 (02) Agustus, 14-24.
- Wahyuningrum, D., & Aisyah, S. (2023). Do Government Policies and Socioeconomic Conditions Affect Income Inequality?. *Economics Development Analysis Journal*, 12(1), 13-25
- Walujadi, D., Indupurnahayu, I., & Endri, E. (2022). Determinants of Income Inequality Among Provinces: Panel Data Evidence from Indonesia. *Calitatea*, 23(190), 243-250.
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan pendapatan dan Middle income trap. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 111-132.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia